



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jambu Karang No. 2 Purbalingga * 53311 Jawa Tengah
(0281) 893117 Fax. (0281) 893117
Email: kesbangpol@purbalinggakab.go.id

LAPORAN KINERJA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA**



20 24



KATA PENGANTAR

Dalam pelaksanaan ketatapemerintahan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Kinerja Instansi Pemerintah, dimana di dalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga guna mendukung penerapan tata pemerintahan yang baik berazas akuntabilitas demi mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024.

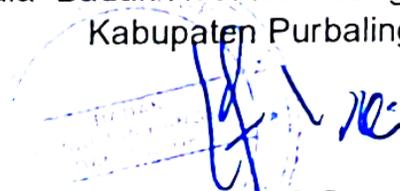
Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Satuan Kerja yang dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri secara baik dan benar, serta akuntabel. Selain itu laporan ini diharapkan mampu menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sehingga dapat memelihara kepercayaan masyarakat di Kabupaten Purbalingga terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dihaturkan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif dalam menyusun dan memberikan masukan terhadap Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, termasuk diantaranya narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Purbalingga, dan tim penyusun. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga serta pihak-pihak lainnya yang terkait.

Purbalingga, Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga



PANDI, S.Sos

NIP. 196907171991011003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	V
Bab I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Gambaran Umum 2
1.2.1	Tugas dan Fungsi 3
1.2.2	Struktur Organisasi 5
1.2.3	SDM Perangkat Daerah 5
1.3	Sistematika Laporan 7
Bab II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Perencanaan Strategis Perangkat Daerah 8
2.1.1	Visi dan Misi 9
2.1.2	Tujuan dan Sasaran 10
2.2	Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Purbalingga 10
2.3	Sasaran dan Arah Kebijakan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga 10
2.3.1	Sasaran 10
2.3.2	Arah Kebijakan Umum 11
2.4	Rencana Kinerja 11
2.5	Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan 12
2.5.1	Tujuan dan Sasaran 12
2.5.2	Kebijakan 12
2.6	Program 13
2.7	Rencana Kerja Tahunan 15
2.8	Perjanjian Kinerja 15
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2024 17
1.1.	Persentase potensi konflik sosial yang diredam tidak menjadi konflik
1.2.	Cakupan pencegahan/ tangkal dini konflik
1.3.	Cakupan pendidikan politik Masyarakat
1.4.	Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan
1.5.	Nilai kematangan Perangkat Daerah
1.6.	Nilai SAKIP BAKESBANGPOL
1.7.	Angka Konflik Sosial
B.	Realisasi Anggaran 41
C.	Permasalahan
Bab IV	PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Pendidikan Formal	6
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Pangkat/Golongan	6
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Eselon	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan Memujudkan Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Keamanan Dalam Masyarakat	19
Tabel 3.3	Indeks Toleransi	20
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban Keamanan dan Perlindungan Masyarakat	21
Tabel 3.5	Rekap Kejadian Konflik Tahun 2023	22
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Berdemokrasi	25
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Demokrasi Yang Sehat dan Partisipasi Politik Masyarakat	27
Tabel 3.11	Analisis Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran 1	29
Tabel 3.12	Analisis Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran 2	30
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran 1	30
Tabel 3.14	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran 2	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaporan merupakan salah satu fase penting yang tidak dapat dipisahkan dalam siklus manajemen. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaporan disamping merupakan wujud tertulis pertanggung jawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, juga sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwasanya setiap pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) SKPD. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban pencapaian kinerja SKPD kepada Bupati Purbalingga terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD selama Tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Purbalingga terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

1.2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Menghadapi *Isu Strategis* berupa **Potensi Konflik Sosial** dan **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu**. Isu strategis ini didasarkan pada permasalahan yang ada meliputi :

Tabel 1.1.
Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kuranginya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masifnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat moderasi dan toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan
			Kuranginya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.
		Kuranginya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi

			Belum optimalnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya money politik dalam pelaksanaan pemilu
2.	Penatausahaan administrasi yang belum optimal	Lemahnya tingkat pemahaman penatausahaan dan administrasi	Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di kantor kesatuan bangsa dan politik baik secara kuantitas maupun kualitas
			Rendahnya pemahaman tentang peraturan, sistem dan prosedur penatausahaan dan administrasi.
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas internal. hal ini disebabkan belum memenuhi standar operasional prosedur kerja.
			Terbatasnya sarana dan prasarana yang ideal dalam menunjang aktivitas pekerjaan. hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga adalah :

a. Masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap fenomena/peristiwa/kejadian di masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini.

Harus disadari bersama bahwasanya dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu kondusifitas daerah dan ketentraman masyarakat tidak bisa melulu menyandarkan pada aparat pemerintah/negara, tapi memerlukan peran aktif seluruh komponen masyarakat. Terkait hal tersebut, dirasa masih kurang kepedulian sebagian masyarakat terhadap fenomena/peristiwa/kejadian di masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini, untuk turut aktif berpartisipasi mengantisipasi timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) tersebut.

b. Adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya merusak kerukunan hidup di masyarakat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dapat meninggalkan

kesan mendalam yang mampu mempengaruhi pola pikir, tindakan dan perilaku masyarakat. Adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya merusak kerukunan hidup di masyarakat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut melalui konten negatif yang bersifat hoax dan berbau propaganda, hate speech atau ujaran kebencian serta menggunakan berbagai cara lainnya dalam usahanya tersebut.

- c. **Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan demokrasi sesuai ketentuan yang berlaku.** Masih sering terdengar berita “*money politic*”, dalam setiap hajatan politik dan penyampaian aspirasi, ataupun tingginya angka golput yang berarti kurang dewasanya sebagian masyarakat dalam berdemokrasi serta kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berpartisipasi/menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik yang pada akhirnya dapat merusak kondusifitas di masyarakat.
- d. **Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat (utamanya generasi muda) terhadap bahaya narkoba.**

Meningkatnya ancaman bahaya narkoba yang ditandai dengan makin maraknya kasus narkoba yang bahkan sudah menyasar lingkungan sekolah dan pedesaan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang intens. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius karena dapat merusak moral masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, khususnya ketentuan pada **Pasal 2 Ayat (1)** BAKESBANGPOL merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok yaitu :

membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan dari fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi yaitu:

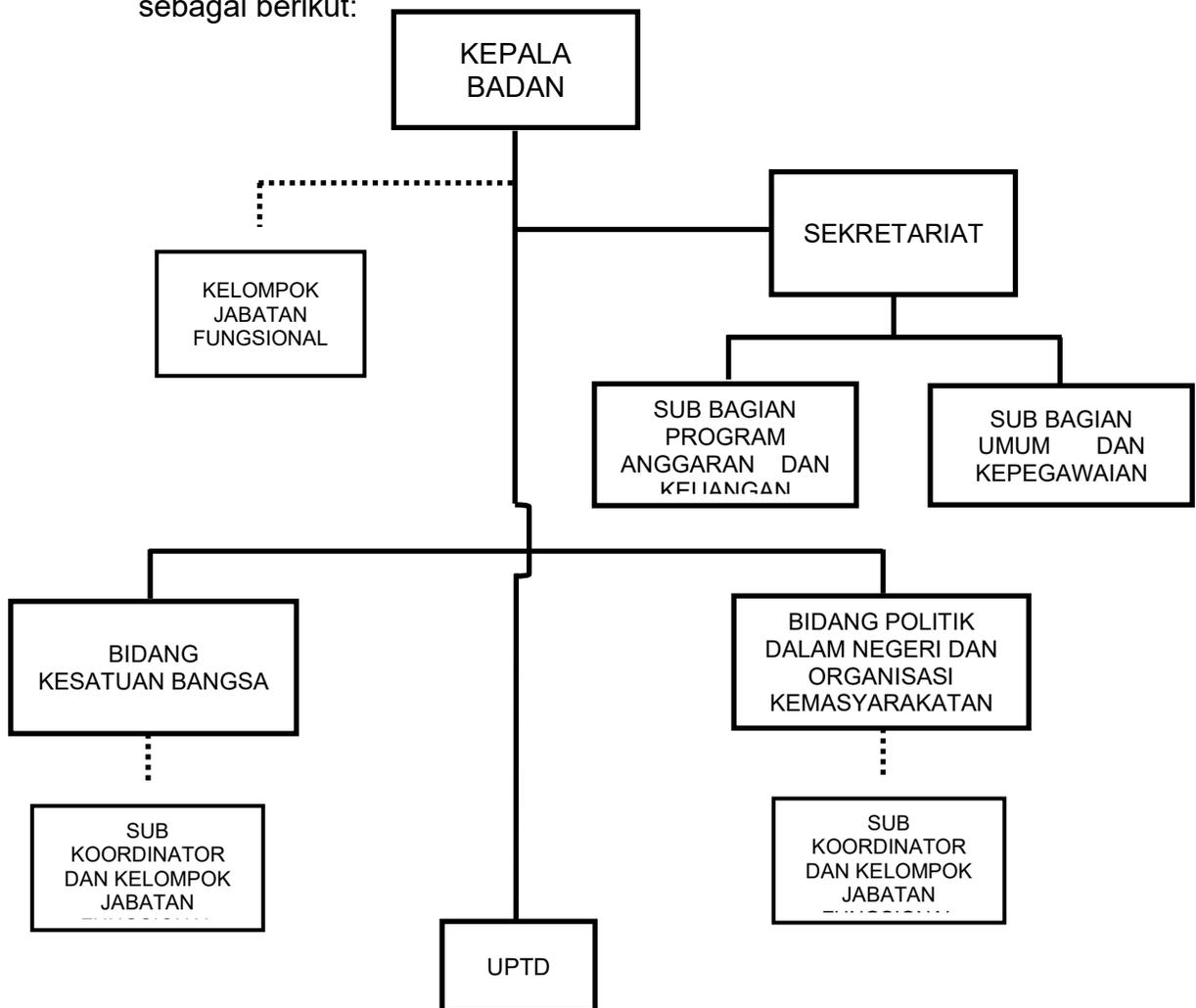
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAKESBANGPOL;

- g. Pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga menangani tugas-tugas di bidang pengembangan wawasan kebangsaan, fasilitasi politik dan pendidikan politik masyarakat, peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman/gangguan yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini, kerjasama terpadu dengan aparat keamanan, instansi terkait serta komponen masyarakat lainnya dalam penanganan konflik sosial baik pra, tanggap darurat maupun pasca.

1.2.2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:



1.2.3. SDM Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 memiliki pegawai sebanyak **20 orang** dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan pendidikan formal

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Pendidikan Formal				
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP
1	Kepala Badan	1		1			
2	Sekretaris	1	1				
3	Kepala Bidang	2		2			
4	Kepala Sub Bagian	2		2			
5	Pelaksana	5		2	1	2	
6	THL	9		5		3	1
Jumlah		20	1	12	1	5	1

Tabel 1.2

Komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan pangkat/golongan

No	Unit Kerja	Pangkat/Golongan			
		IV	III	II	I
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	3	8		
Jumlah		3	8		

Tabel 1.3

Komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan eselon

No	Unit Kerja	Eselon			
		IV	III	II	I
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.	2	3	1	
Jumlah		2	3	1	

1.3. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kepala Badan. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen formal yang memuat pernyataan, kesepakatan, atau komitmen antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tertentu dalam satu tahun anggaran. Target tersebut ditetapkan berdasarkan sasaran strategis organisasi serta kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja adalah dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, yang memuat program dan kegiatan yang harus dilaksanakan, lengkap dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar akuntabilitas dan pengukuran kinerja, serta menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), ditemukan bahwa kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja dalam SAKIP Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian agar indikator kinerja yang digunakan benar-benar mencerminkan capaian yang bermakna dan berdampak nyata terhadap kinerja organisasi.

Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Inspektorat Daerah melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan arah pencapaian yang strategis dan berdampak. Sebagai bentuk komitmen dalam perbaikan sistem akuntabilitas kinerja, penyesuaian IKU tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024. Perubahan IKU tentunya secara langsung mengubah sasaran, indikator, dan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sebelum perubahan:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik sosial yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95,30
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Rasio	31,9/10.000 penduduk
	Meningkatnya implementasi SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai SAKIP BAKESBANGPOL	Indeks	74,3
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Persen	0,32
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,20

Secara umum, struktur Perjanjian Kinerja tahun 2024 masih mempertahankan tujuan dan sasaran utama yang berfokus pada peningkatan wawasan kebangsaan, pencegahan konflik sosial, serta partisipasi politik masyarakat. Namun, terdapat beberapa perbaikan dan penambahan penting, antara lain:

1. Penyempurnaan indikator kinerja, khususnya pada aspek format satuan dan penyesuaian target agar lebih realistis dan terukur (Menurunnya potensi konflik dimasyarakat dari 31,9/10.000 penduduk menjadi 31,9;
2. Penurunan target nilai SAKIP dari 74,3 menjadi 73,10, menyesuaikan dengan hasil evaluasi dan kondisi faktual;
3. Penambahan tujuan baru terkait peningkatan kualitas kelembagaan Badan Kesbangpol, yang diikuti dengan sasaran baru, yaitu nilai kematangan perangkat daerah. Sasaran Meningkatkan implementasi SAKIP BAKESBANGPOL menjadi bagian dari tujuan baru ini.

Penyesuaian ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang

menjadi tugas dan fungsi Badan Kesbangpol. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Setelah Perubahan)
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik sosial yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95,30
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Rasio	31,9
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Persen	0,32
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,20
Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL		Nilai kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43
	Meningkatnya implementasi SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai	73,10

Dalam rangka mewujudkan perjanjian kinerja tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 37 sub kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp.34.619.389.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.875.417.592,- atau 97,85% yang meliputi :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.34.619.389.000,- dengan realisasi sebesar Rp.33.875.417.592,- atau sebesar 97,85%;
2. Belanja Modal sebesar Rp.0,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dengan rincian setiap program sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Target	Alokasi Anggaran	Sumber Dana
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		34.619.389.000	DAU
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.501.069.000	DAU

2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		642.195.000	DAU
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		29.121.289.000	DAU
4	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		909.060.000	DAU
5	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		182.120.000	DAU
6	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		1.263.656.000	DAU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan *sasaran* dan *tujuan* organisasi yang tertuang dalam *rencana strategis* organisasi. *Capaian kinerja* dapat diketahui dari *pengukuran kinerja*, yaitu proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang telah dilaksanakan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian (Assesment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penghitungan capaian kinerja kegiatan

sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1 Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TARGET 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	%
1	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	92,96	95,30	97,37	102,17
		Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Rasio	2,63	31,90	25,81	80,91
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Persen	0,28	0,32	3,58	1.118,75
			Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,16	0,20	0,37	185,00
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL		Nilai kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43,00	43,00	43,00	100,00
		Meningkatnya implementasi SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai SAKIP Bakesbangpol	Nilai	73,01	73,10	73,06	99,95
Rata-rata Capaian								281,13

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 281,13% atau kategori **Sangat Tinggi**.

3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target Jangka Menengah

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga diukur berdasarkan hasil pencapaian sasaran pada akhir tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) SKPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga memiliki dua tujuan dengan empat sasaran strategis. Realisasi atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir sebagaimana rincian pada tabel berikut

Tabel 3.4

**Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga s.d. Tahun 2024**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		CAPAIAN KINERJA			TARGET 2025	KONDISI AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN RENSTRA s.d. 2024	
					2020	2021	2022	2023	2024				
1	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	N/A	N/A	95,12	92,96	97,37	97,5	95	102,49	
			Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Per 10.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	2,63	25,81	31,9	31,9	80,91	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	0,28	3,58	3,65	3,75	95,47
				Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	N/A	N/A	N/A	0,16	0,37	0,45	0,85	43,53
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL		Nilai kematangan Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	43,00	43,00	43	44	97,73	
			Meningkatnya implementasi SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai SAKIP Bakesbangpol	Nilai	N/A	65	71,16	73,01	73,06	73,11	72	101,47

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan 1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik Masyarakat

Indikator kinerja tujuan 1 adalah Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik mendapatkan nilai rata-rata

97,37% dengan kategori **tinggi**. Capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 95,30%, dan melampaui target akhir Renstra (2026) sebesar 102,49%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 92,96, maka capaian kinerja Indikator–Kinerja Utama Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik mengalami kenaikan dengan tingkat kemajuan 104,74% didukung oleh:

- a) Adanya deteksi dini potensi konflik masyarakat yang telah diterapkan sampai dengan level pemerintahan desa/kelurahan
- b) Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan *stakeholder* melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Agen Kewaspadaan Dini Daerah;
- c) Penggunaan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASDINDA).

Capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 95,30%, walaupun secara umum potensi konflik yang ada di Kabupaten Purbalingga naik dari tahun 2023 sebanyak 71 potensi menjadi 76 potensi konflik di tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 60 potensi konflik, dan 74 potensi konflik dapat diredam tidak menjadi konflik. Tingginya potensi konflik di tahun 2024 dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a) Tahun 2024 merupakan tahun politik yaitu diselenggarakannya Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 menyumbang potensi konflik terbesar berupa gesekan antar pendukung kontestan pemilu/pilkada, sebanyak 37 dari 76 potensi yang ada;
- b) Masih adanya permasalahan internal perusahaan yang berujung pada penundaan pembayaran gaji karyawan dapat mengakibatkan aksi mogok kerja dan PHK massal, dikhawatirkan berimbas kepada iklim investasi di Kabupaten Purbalingga;
- c) Banyaknya pabrik yang tidak memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik;
- d) Masih adanya potensi konflik internal kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berimbas kepada ancaman ketertiban umum dan gesekan antar ormas.

Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Tujuan 1: Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Partisipasi Politik Masyarakat

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024			Target 2025	Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Renstra s.d. 2024
			2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian Kinerja			
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik Masyarakat	Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	N/A	N/A	95,12	92,96	95,3	97,37	102,17	97,5	95	102,49

Tujuan 1 ini mendukung pencapaian misi kedua Bupati Purbalingga yaitu:

Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dari keragaman yang ada, potensi konflik yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga secara umum tidak ada konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga dan situasi kondisi pun tetap kondusif. Adapun beberapa isu konflik yang terjadi pada tahun 2024 antara lain:

- 1) Perselisihan antar pendukung kontestan pilkada;
- 2) Ketidakpuasan buruh/karyawan pabrik terhadap perusahaan;
- 3) Pengelolaan limbah pabrik yang tidak sesuai AMDAL;
- 4) Galian C
- 5) Permasalahan internal organisasi kemasyarakatan;

Selanjutnya dalam rangka mencapai target kinerja tujuan tersebut, langkah-langkah strategis yang telah ditempuh adalah:

- 1) Optimalisasi sasaran program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan melaksanakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Pembentukan Desa Pelopor Pancasila yaitu Desa Langgar Kecamatan Kejobong, Desa Babakan dan Desa Bojanegara Kecamatan Padamara;
- 2) Optimalisasi pemantauan kegiatan WNA dan NGO di masyarakat, agar dapat dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang mengarah pada penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan potensi ke kriminal;
- 3) Memperkuat kelembagaan FKDM sebagai upaya memperkuat deteksi dini dan cegah dini terhadap segala kemungkinan masalah IPOLEKSOSBUDKAM;
- 4) Optimalisasi koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- 5) Optimalisasi koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 6) Meningkatkan fasilitasi forum kemitraan FKUB, meningkatkan sosialisasi Kerukunan Hidup Beragama, sosialisasi moderasi beragama, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pendirian rumah ibadah dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembauran kebangsaan;
- 7) Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan keormasan;
- 8) Fasilitasi kegiatan ormas;
- 9) Memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berita hoax, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh keagamaan.

Capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dijelaskan secara rinci dengan membandingkannya dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut:

1) Sasaran Menurunnya Potensi Konflik di Masyarakat

Capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya potensi konflik di Masyarakat dengan indikator kinerja Cakupan

pencegahan/tangkal dini konflik pada tahun 2024 sebesar 80,91% dari target 31,9/10.000 penduduk, tercapai 25,81/10.000 penduduk, atau **Tinggi**, namun masih di bawah target akhir Renstra (2026) sebesar 31,9/10.000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 8,76/10.000 penduduk, maka capaian kinerja Indikator Kinerja Utama mengalami kenaikan signifikan, dengan tingkat kemajuan 294,63% didukung oleh adanya sosialisasi penanganan konflik sosial kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh wanita pada wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi, kerjasama dengan Lembaga Pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi dan melaksanakan sosialisasi secara *hybrid*, luring dan daring, sehingga jumlah peserta sosialisasi dapat dimaksimalkan. Dengan metode *hybrid* ini capaian kinerja jauh melampaui target yang ditetapkan.

Data capaian kinerja sasaran dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Sasaran

Menurunnya Potensi Konflik di Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024			Target 2025	Kondisi Akhir Renstra	% Capaian renstra s.d. 2024
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian Kinerja			
Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/	Potensi	N/A	N/A	N/A	8,76	31,9	25,81	80,91	31,9	31,9	80,91
	tangkal dini konflik											

Potensi konflik sosial yang dilaporkan di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 71 potensi menjadi 76 potensi konflik di tahun 2024. Kenaikan potensi konflik ini telah diprediksi sebelumnya berdasarkan analisis terhadap potensi perkembangan kerawanan sosial yang mungkin terjadi di tahun politik dengan diselenggarakannya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dari 76 potensi konflik yang muncul di masyarakat sebanyak 74 potensi konflik dapat diredam tidak menjadi konflik, dan sebanyak 2 (dua) potensi konflik tidak dapat diredam melalui jalur mediasi dan musyawarah mufakat,

kemudian berkembang menjadi konflik berupa aksi unjuk rasa dan bentrokan fisik.

Potensi konflik yang tidak dapat diredam sehingga berkembang menjadi konflik ini diperhitungkan sebagai indikator Angka Konflik Sosial. Dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, angka konflik sosial menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan target tahun 2025 sebesar 0,057.

Apabila dihitung capaian penurunan angka konflik sosial pada tahun 2024 adalah sebesar 0,019 dengan perhitungan 2 kejadian per 10.000 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 sebanyak 1.057.750 jiwa, maka capaian tersebut sangat tinggi.

Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angka Konflik Sosial} &= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial} \times 10.000}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{2 \times 10.000}{1.057.750} \\ &= 0,019 \end{aligned}$$

Menurunnya Angka Konflik Sosial dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Menurunnya Angka Konflik Sosial

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa konflik Poleksosbud di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,048 menjadi sebesar 0,019 di tahun 2024.

Konflik yang terjadi pada tahun ini dapat di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Rekapitulasi Kejadian Konflik Tahun 2024

No	Tanggal	Keterangan
1.	24 Juni 2024	Unjuk rasa Karyawan PT TRESNINDO ABADI CEMERLANG Alamat Desa Brobot Kec Bojongsari Kabupaten Purbalingga menuntut upah Karyawan yang belum di bayarkan
2.	25 November 2024	Bentrok fisik ormas yang diduga berasal dari luar daerah dengan masyarakat di desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara berkaitan dengan dukungan kontestasi pilkada

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target yang telah di tetapkan telah tercapai, hal ini dikarenakan konflik yang terjadi mengalami penurunan menjadi adalah 2 (dua) kejadian dari tahun sebelumnya yaitu 5 (lima) kejadian. Adapun penyebab yang paling dominan dari potensi konflik di tahun 2024 adalah adanya perselisihan antar pendukung kontestan pilkada pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan capaian sebesar 80,91% perlu adanya langkah langkah antisipatif yang harus ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar potensi konflik yang dilaporkan dapat diredam tidak berkembang menjadi konflik, dan capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dalam upaya untuk menurunkan konflik di Kabupaten Purbalingga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga selaku perangkat daerah yang menangani permasalahan konflik sosial telah menempuh langkah-langkah antara lain :

- a) Membentuk dan memfasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- b) Melaksanakan kegiatan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purbalingga guna mendapatkan penyelesaian diantara pihak-pihak yang bermasalah;
- c) Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial ke masyarakat

bersama instansi terkait. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang setiap saat bisa muncul seiring dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dan berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi saat itu;

- d) Memberdayakan masyarakat utamanya para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah *Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)*. Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan operasional FKDM sebagai wahana menggali informasi, menyikapi dan mengevaluasi dinamika situasi kondisi daerah setempat;
- e) Memberdayakan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui wadah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dan fasilitasi pembentukan FKUB hingga tingkat kecamatan. Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan FKUB sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar umat beragama, serta menyikapi dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dengan cepat yang dapat mempengaruhi kehidupan umat beragama;
- f) Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk turut serta menjaga kerukunan dan meminimalisir potensi konflik;
- g) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba melalui penyuluhan P4GN di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk meminimalisir kasus narkoba yang dapat berakibat pada permasalahan sosial dan kriminal;
- h) Membentuk dan memfasilitasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- i) Mengadakan sarasehan kebangsaan;
- j) Mengadakan sosialisasi pemantapan faham Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan pembentukan Desa Pelopor Pancasila;
- k) Memberdayakan dan mengembangkan Agen Kewaspadaan Dini Daerah (AWASDINDA) yang saat ini beranggotakan perangkat desa pada desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi maupun sedang di bawah koordinasi Kasi Pemtrantibum Kecamatan.

AWASDINDA ini bertujuan melaporkan potensi konflik yang terjadi di wilayah masing-masing agen kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk mendapatkan rekomendasi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik.

2) **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri**

Sasaran strategis Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat dan Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Pada indikator kinerja 1 yaitu Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 1118,75% berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 0,32% dari jumlah penduduk usia 16-17 tahun tercapai 3,58%. dengan kategori **Sangat Tinggi**, namun masih dibawah target akhir Renstra (2026) sebesar 3,75% dengan capaian 95,47%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,28% dari penduduk usia 16-17 tahun, maka capaian kinerja Indikator Kinerja Utama mengalami kenaikan signifikan, dengan tingkat kemajuan 1.278,57% didukung oleh:

- a) Terselenggaranya Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran pemilih pemula usia 16 s.d. 17 tahun di satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan secara *hybrid*, luring dan daring, sehingga jumlah peserta sosialisasi dapat dimaksimalkan. Dengan metode *hybrid* ini capaian kinerja jauh melampaui target yang ditetapkan;
- b) Adanya koordinasi yang baik dengan lembaga pendidikan menengah dan kejuruan dalam upaya melaksanakan pendidikan politik kepada siswa SMA/SMK;
- c) Terselenggaranya Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran pemilih pemula usia 16 s.d. 17 tahun di satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan secara *hybrid*, luring dan daring, sehingga jumlah peserta sosialisasi dapat dimaksimalkan. Dengan metode *hybrid* ini capaian kinerja jauh melampaui target yang ditetapkan;
- d) Adanya koordinasi yang baik dengan lembaga pendidikan menengah dan kejuruan dalam upaya melaksanakan pendidikan politik kepada siswa SMA/SMK;

Untuk indikator kinerja 2 yaitu Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan mendapatkan nilai rata-rata 185% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 0,20% dari penduduk usia produktif, tercapai 0,37% dengan kategori **Sangat Tinggi**, namun masih jauh di bawah target akhir Renstra (2026) sebesar 0,85% atau baru tercapai 43,53%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,16%, dari penduduk usia produktif, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan mengalami kenaikan dengan tingkat kemajuan 231,25% didukung oleh:

- a) Terselenggaranya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran penduduk usia produktif;
- b) Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan
- c) Adanya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi dan melaksanakan sosialisasi secara *hybrid*, luring dan daring, sehingga jumlah peserta sosialisasi dapat dimaksimalkan. Dengan metode *hybrid* ini capaian kinerja jauh melampaui target yang ditetapkan;

Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik Dalam Negeri

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024			Target 2025	Kondisi Akhir Renstra	% Capaian renstra s.d. 2024
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja			
Meningkatnya peran serta masyarakat	Cakupan pendidikan politik	Persen	N/A	N/A	N/A	0,28	0,32	3,58	1118,75	3,65	3,75	95,47
	Cakupan pendidikan wawasan	Persen	N/A	N/A	N/A	0,16	0,2	0,36	185	0,45	0,85	43,53

Pada pemilu 2024, terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Purbalingga dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.8

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018 s.d. 2024

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-Rata)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pilkada Kabupaten/Kota	68,86	N/A	73,47	N/A	N/A	N/A	74,58
2	Pilgub dan Wagub	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,58
3	Pileg DPR/DPD	N/A	78,35	N/A	N/A	N/A	N/A	86,50
4	Pilpres dan Wapres	N/A	78,35	N/A	N/A	N/A	N/A	86,50

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Politik Dalam Negeri adalah :

- a) Masyarakat merasa partisipasi mereka tidak akan memberikan perubahan berarti bagi kehidupan mereka terutama dari segi sosial dan ekonomi;
- b) Masyarakat kurang mampu memahami dinamika serta proses politik yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan cenderung apatis terhadap politik atau Pemilu;
- c) Masih marak dan membudayanya praktik *money politic*, sehingga ada anggapan di masyarakat pada umumnya kapan lagi mendapatkan uang dari kontestan pemilu kalau bukan pada saat mereka membutuhkan hak pilih masyarakat, maka apabila tidak dikasih uang untuk memilih dalam pemilu, mereka tidak akan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- d) Belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula

Solusi yang dilakukan adalah :

- a) Diadakan sosialisasi, fasilitasi, peningkatan pendidikan politik masyarakat khususnya melalui peran partai politik.
- b) Melaksanakan Pendidikan Politik kepada Pemilih pemula;
- c) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);
- d) Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Ormas;
- e) Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur Penyelenggara Pilkada, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);
- f) Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada kepada aparat pemerintah yang menangani Pemilu;
- g) Fasilitasi pelaksanaan Pilkada kepada Lembaga penyelenggara pemilu;
- h) Melaksanakan Monitoring / Pemantauan dampak politik Pemilu.

-
- i) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

3.2.2 Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakesbangpol

Terdapat dua indikator pada tujuan kedua Bakesbangpol, yaitu:

1) Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pada Bakesbangpol Purbalingga mendapatkan skor 43 dengan tingkat Kematangan Perangkat Daerah tinggi, nilai tersebut diperoleh karena hal-hal sebagai berikut:

a. Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan antara lain :

- Keberhasilan pencapaian kinerja sangat ditentukan oleh perencanaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Bakesbangpol memiliki dokumen perencanaan seperti Renstra, RKPD, cascading, dan perjanjian kinerja yang saling selaras, sehingga lebih mudah dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan strategis secara efektif. Kejelasan indikator dan target kinerja yang terukur menjadi dasar kuat dalam menilai keberhasilan kinerja organisasi.
- Kepatuhan dalam mengimplementasikan sistem manajemen kinerja menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kematangan sebuah perangkat daerah. Penggunaan aplikasi pengukuran kinerja, seperti E-SAKIP dan e-Kinerja, secara konsisten dan akurat menunjukkan bahwa proses pengumpulan, pengukuran, dan pemantauan kinerja telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodic baik bulanan, triwulanan, maupun semesteran merupakan mekanisme pengendalian yang sangat penting dalam menjaga ketercapaian kinerja. Ketika hasil

evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan, Bakesbangpol Purbalingga menunjukkan kematangan dalam mengelola perubahan serta responsif terhadap tantangan dan hambatan.

- b. Hambatan/ Kendala yang dihadapi dalam Capaian Kinerja
- Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami konsep dasar manajemen kinerja, seperti penyusunan indikator kinerja, cascading sasaran, serta pelaporan berbasis hasil. Hal ini menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan kinerja belum optimal dan tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip akuntabilitas.
 - Masih ditemukan kelemahan dalam pengumpulan dan penyimpanan bukti fisik maupun digital atas capaian kinerja, baik di tingkat individu maupun unit kerja. Tanpa data dukung yang memadai, evaluasi kinerja menjadi sulit dan hasil pelaporan rawan dipertanyakan validitasnya.
- c. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja
- Melakukan Study Komparasi dengan OPD lain atau Bakesbangpol daerah lain dalam penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik. Hal ini juga mendorong pegawai yang belum sepenuhnya memahami konsep dasar manajemen kinerja untuk menjadi lebih memahami.
 - Pimpinan Bakesbangpol Purbalingga mengarahkan setiap bidang untuk melaksanakan kegiatan sesuai target dan melakukan pengendalian secara berkelanjutan. Koordinasi antarbidang juga diperkuat untuk memastikan integrasi pelaksanaan program dan sinergi antarunit dalam mencapai sasaran strategis.
 - Setiap bidang dan pegawai pada Bakesbangpol Purbalingga diarahkan untuk melakukan dokumentasi dan pengumpulan data dukung atas capaian kinerja. Hal ini penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta sebagai dasar dalam evaluasi dan pemberian penghargaan atas prestasi kerja.
- d. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

pencapaian kinerja pada indikator tujuan Bakesbangpol Kabupaten Purbalingga ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi Rp2.282.855.732 karena program ini mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum dan bersifat koordinatif dan pembinaan internal.

2) Nilai SAKIP Bakesbangpol

Capaian sasaran strategis Meningkatnya Kelembagaan Kesbangpol nilai capaian SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mendapatkan nilai 73,06 atau tercapai sebesar 99,95% dari target yang ditetapkan yaitu 73,10 dengan kriteria Sangat Tinggi dan predikat“BB” (Sangat Baik), yang berarti bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Capaian kinerja ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,5 atau naik 100,07% didukung oleh adanya komitmen pimpinan dan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP Kesbangpol;

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

Tabel 3.9

Komponen Hasil Evaluasi SAKIP Bakesbangpol Tahun 2024

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,40	6,30	10,50	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,80	6,30	10,50	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,40	3,60	5,25	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	4,00	5,25	8,75	18,00

Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	16,60	21,45	35,00	73,06
-----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Adapun capaian kinerja tujuan Meningkatnya Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan 2:
Meningkatnya Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024			Target 2025	Kondisi Akhir Renstra	% Capaian Renstra s.d. 2024
				2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja			
Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL		Nilai kematangan Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	43	43	43	100	43	44	97,73
	Meningkatnya implementasi SAKIP BAKESBANGPOL		Nilai	N/A	65	71,16	73,01	73,1	73,06	99,95	73,11	72	101,47

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai SAKIP BAKESBANGPOL adalah :

1. Rekomendasi Evaluasi SAKIP 2024

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP 2024, Bakesbangpol direkomendasikan untuk:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1) Menyusun Indikator Kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja (Cascading dan Perjanjian Kinerja) dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja triwulanan agar target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dapat tercapai.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- 1) Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia : E-SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) dan E-kinerja (<https://ekinerja.purbalinggaakab.go.id/>);
- 2) Meningkatkan pengendalian, sekaligus memerintahkan setiap pegawai untuk mengisi e-kinerja secara tertib dan memerintahkan kepada pejabat untuk melakukan verifikasi atasan pada mekanisme pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja;
- 3) Meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment)

atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

Mendokumentasikan data laporan kinerja masing masing pegawai/unit sebagai penyusun penilaian kinerja kegiatan/program/sasaran/tujuan organisasi

d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 serta menyajikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2024;
- 2) Melakukan pengendalian agar tidak muncul pengulangan rekomendasi yang sama pada hasil Evaluasi SAKIP.

2. Tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP 2024

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1) Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kesbangpol telah melakukan penyelarasan penyusunan indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan dalam dokumen perencanaan kinerja (cascading dan perjanjian kinerja) dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagai perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

- 2) Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan

Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja triwulanan dilaksanakan secara berkala, dan hasilnya digunakan untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan agar target dalam rencana aksi dapat dicapai secara optimal dan tepat waktu.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

1) Pemanfaatan Aplikasi Pengukuran Kinerja

Badan Kesbangpol mendukung penuh pemanfaatan dan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja yaitu E-SAKIP (<https://sakup.purbalinggakab.go.id>) dan E-Kinerja (<https://ekinerja.purbalinggakab.go.id>). Penggunaan kedua aplikasi tersebut dipastikan terintegrasi dengan proses pelaporan dan evaluasi.

2) Pengendalian dan Tertib Pengisian E-Kinerja

Setiap pegawai diwajibkan untuk mengisi e-kinerja secara tertib dan tepat waktu, serta pejabat yang berwenang diminta untuk melakukan verifikasi atasan guna menjaga validitas data kinerja harian dan bulanan.

3) Penguatan Mekanisme Reward and Punishment

Telah dilakukan evaluasi terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar sejalan dengan kinerja aktual. Penghargaan dan sanksi (reward and punishment) diterapkan secara proporsional untuk mendorong peningkatan disiplin dan produktivitas.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

Badan Kesbangpol telah meningkatkan pendokumentasian data laporan kinerja baik pada level pegawai, unit kerja, maupun instansi secara menyeluruh. Dokumentasi ini dijadikan dasar dalam penilaian kinerja program, kegiatan, sasaran, dan tujuan organisasi, sekaligus sebagai bahan akuntabilitas publik dan bahan evaluasi internal.

d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1) Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP dan LKJIP

Seluruh rekomendasi yang tertuang dalam Laporan

Kinerja Tahun 2023 maupun Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 telah dikaji dan ditindaklanjuti. Upaya tindak lanjut tersebut akan disajikan secara rinci pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen perbaikan.

2) Pengendalian atas Rekomendasi Berulang

Penguatan fungsi pengendalian internal dilakukan secara konsisten untuk menghindari munculnya rekomendasi yang sama pada evaluasi berikutnya. Setiap rekomendasi menjadi dasar pembelajaran dan perbaikan sistem kerja agar terus bergerak menuju peningkatan kualitas birokrasi.

3. Hambatan/kendala yang dihadapi

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1) Pemahaman personil terhadap penyusunan indikator kinerja, khususnya indikator kinerja program, masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar indikator yang disusun benar-benar mencerminkan kinerja yang strategis, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi.
- 2) Proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan telah dilakukan oleh masing-masing bidang teknis, namun dokumentasinya masih belum tertata dengan baik dan sistematis. Hal ini berpotensi menghambat proses pelacakan kemajuan program, penilaian efektivitas pelaksanaan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan terhadap mekanisme pelaporan dan penyimpanan dokumen Monev, termasuk penetapan format baku dan jadwal pelaporan berkala.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- 1) Aplikasi E-SAKIP atau Aplikasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga saat ini masih berada dalam tahap pengembangan. Kondisi

ini menyebabkan pemanfaatannya dalam proses pengumpulan dan analisis data kinerja belum optimal, sehingga perlu percepatan penyempurnaan dan peningkatan kapasitas penggunaan.

- 2) Pemanfaatan aplikasi e-kinerja sebagai alat pengukuran kinerja harian pegawai masih belum dilaksanakan secara optimal. Ditemukan bahwa pengisian aktivitas harian belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah hari kerja efektif, dan dalam beberapa kasus tidak menggambarkan secara akurat pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selain itu, verifikasi atasan terhadap kinerja bawahan masih terbatas, sehingga pengendalian terhadap kualitas data kinerja belum maksimal. Diperlukan peningkatan kepatuhan dalam pengisian e-kinerja serta penguatan peran atasan langsung dalam melakukan verifikasi dan pembinaan kinerja.
- 3) Pemberian reward dan punishment telah dilaksanakan, namun teguran dan pembinaan bagi pegawai yang tidak mematuhi aturan belum terdokumentasikan dengan baik.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

Aspek pendokumentasian data dukung terhadap kinerja individu pegawai masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Data dukung yang lengkap, sah, dan mudah diakses sangat penting sebagai dasar dalam verifikasi kinerja, evaluasi prestasi kerja, serta pemberian reward dan punishment. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu didorong untuk menyusun dan mengarsipkan bukti dukung kinerja secara teratur, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Dalam menindaklanjuti LHE SAKIP 2023 dan 2024 perlu dimaksimalkan agar tidak terjadi pengulangan

rekomendasi di tahun berikutnya.

- 2) Efektivitas evaluasi kinerja secara internal masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi frekuensi, metode, maupun kualitas analisis hasil evaluasi. Evaluasi yang kuat akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan kinerja ke depan.

4. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

a. Komponen Perencanaan Kinerja

- 1) Melakukan perbaikan IKU dan indikator kinerja program
- 2) Melakukan perbaikan pohon kinerja dengan memperhatikan *Critical Success Factor (CSF)*.
- 3) Melakukan perbaikan cascading pada aplikasi <https://cascading.purbalingga.go.id>
- 4) Melakukan perbaikan rencana aksi, Perjanjian Kinerja, PPS, dan PKPK.
- 5) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian maupun bukti dukung pencapaian kinerja.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

- 1) Seluruh pegawai sudah menyampaikan laporan kinerja pada aplikasi e-kinerja tepat waktu;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang atas aktivitas dan pengukuran kinerja pegawai melalui aplikasi e-kinerja;
- 3) Pemberian *reward* dan *punishment* telah dilaksanakan dan didokumentasi dengan baik .

c. Komponen Pelaporan Kinerja

Dokumentasi data dukung kinerja masing-masing pegawai telah dilakukan dengan baik

d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Bakesbangpol Kabupaten Purbalingga telah menindaklanjuti LHE SAKIP 2023 dan 2024 agar tidak

terjadi pengulangan rekomendasi di tahun berikutnya.

3.3 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Program Prioritas Nasional yang relevan dengan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yaitu Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional.

Perbandingan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan Program Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Perbandingan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			
			Nasional	Provinsi	Kabupaten	Persen
Menguatnya Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	Persen	81,84	82,50	86,50	100,81
	Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100,00

3.4 Analisis Efisiensi

Pencapaian Kinerja Sasaran didukung dengan program sebagai berikut:

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung
Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Meningkatkan kualitas kelembagaan KESBANGPOL	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Nilai SAKIP KESBANGPOL	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Analisis data efisiensi sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Data Efisiensi Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Tingkat Efisiensi
Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	31,90	25,81	80,91	1.263.656.000	921.805.577	72,95	7,96
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	0,32	0,36	111,88	29.121.289.000	29.082.887.732	99,87	12,01
	Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	0,20	0,24	120,00	642.195.000	606.987.336	94,52	25,48
Meningkatnya implementasi SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai kematangan Perangkat Daerah	43,00	43,00	100,00	2.501.069.000	2.282.855.732	91,28	25,48
	Nilai SAKIP BAKESBANGPOL	73,10	73,06	99,95				

Adapun analisis atas efektifitas penggunaan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15

**Data Analisis atas Efektifitas Penggunaan Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Anggaran/ Realisasi	Capaian Anggaran	Keterangan
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik Masyarakat		Persentase potensi konflik sosial yang diredam tidak menjadi konflik	102,17	34.619.389.000	33.875.417.592	Efisien
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/ tangkal dini konflik	80,91	921.805.577	72,95	Efisien
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	1118,75	29.082.887.732	99,87	Efisien
		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	120,00	606.987.336	94,52	Efisien
Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL	Meningkatnya implementasi SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai kematangan Perangkat Daerah	100,00	2.282.855.732	91,28	Efisien
		Nilai SAKIP BAKESBANGPOL	99,95			

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, untuk mencapai 2 Tujuan dan 3 Sasaran dianggarkan sebesar Rp34.619.389.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.875.417.592,00 atau 97,85%. Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

3.4.1 Tujuan 1 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatkan

pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.1.263.656.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.921.805.577,00 atau 72,95% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 80,91%. Efisiensi tersebut merupakan hasil upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* yang memiliki tujuan dan sasaran kinerja yang selaras dengan tujuan dan sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Purbalingga;
- 2) Mengintegrasikan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan Program dan Kegiatan *Stakeholder*, terutama Lembaga Pendidikan yaitu SMA dan SMK se Kabupaten Purbalingga, Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), serta instansi vertikal yaitu Kantor Imigrasi Cilacap dan Wonosobo, Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kepolisian Resor Purbalingga, Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga, Batalyon Infanteri 406/Purbalingga, Lanud JB. Soedirman/Purbalingga, Pengadilan Negeri Purbalingga, Badan Intelijen Negara, Pangkalan TNI AL, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan desa serta Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan menggunakan metode *hybrid* yaitu daring dan luring, sehingga sebaran sosialisasi lebih luas dan jauh melampaui target yang ditetapkan.

Tujuan 1 memiliki sasaran antara lain:

- 1) Sasaran menurunnya potensi konflik dimasyarakat
Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran Menurunnya potensi konflik dimasyarakat dengan persentase penyerapan anggaran pada indikator kinerja Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik yang dilaksanakan melalui

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.921.805.577,00 dari anggaran sebesar Rp.1.263.656.000,00 atau sebesar 72,95% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 80,91%.

Efisiensi yang dicapai pada sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan dengan sasaran penduduk usia produktif;
 - b. Adanya deteksi dini potensi konflik masyarakat yang telah diterapkan sampai dengan level pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Forkopimda dan *stakeholder* melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Agen Kewaspadaan Dini Daerah;
 - d. Implementasi Inovasi Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASDINDA).
- 2) Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri
- Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.29.121.289.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.29.082.887.732,00 atau 99,87% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 1118,75%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
- a. Adanya koordinasi yang baik dengan lembaga pendidikan

menengah dan kejuruan dalam upaya melaksanakan pendidikan politik kepada siswa SMA/SMK sehingga dapat terselenggara Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran pemilih pemula usia 16 s.d. 17 tahun di satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan;

- b. Adanya koordinasi yang baik dengan *stakeholder* penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga);
- c. Terbinanya organisasi kemasyarakatan melalui fasilitasi kegiatan kemasyarakatan ormas;
- d. Fasilitasi kegiatan pendidikan politik melalui bantuan keuangan partai politik berjalan dengan baik;
- e. Melaksanakan Sosialisasi dengan menggunakan metode *hybrid* yaitu daring dan luring, sehingga sebaran sosialisasi Pendidikan politik lebih luas dan jauh melampaui target yang ditetapkan.

3.4.2 Tujuan 2 Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL dengan indikator kinerja Nilai kematangan Perangkat Daerah dan sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP KESBANGPOL dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.2.282.855.732,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.501.069.000,00 atau sebesar 91,28% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100% dan capaian kinerja sasaran sebesar 99,95%. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan kinerja;
- 2) Adanya komitmen pimpinan dan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP Kesbangpol;

3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja

Keberhasilan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga didukung adanya anggaran yang mencukupi dan koordinasi yang baik dengan *stakeholder*, antara lain:

3.5.1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan. Program penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan menunjang pencapaian Tujuan 1 dan Sasaran 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan menunjukkan keberhasilan program dengan indikator tidak adanya potensi konflik ideologi yang mencuat di wilayah Kabupaten Purbalingga.

3.5.2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik menunjang pencapaian Tujuan 1 dan Sasaran 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Purbalingga bersinergi dengan Lembaga-lembaga terkait, antara lain Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Partai Politik, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Pendidikan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dengan sasaran pemilih pemula;

3.5.3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja dari program ini adalah Prosentase Ormas yang Terbina. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan menunjang pencapaian Tujuan 1 dan Sasaran 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga memberikan fasilitasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga;

3.5.4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya menunjang pencapaian 1 Tujuan dan Sasaran 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Purbalingga bersinergi dengan Lembaga-lembaga terkait, antara lain Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Purbalingga dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta penyuluhan HIV/AIDS;

3.5.5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja dari program ini adalah Jumlah Potensi Konflik yang Terpantau di Kabupaten Purbalingga. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial menunjang pencapaian Tujuan 1 dan Sasaran 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalin koordinasi yang baik dengan TNI/Polri serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Purbalingga mampu menjaga kondisi Kabupaten Purbalingga aman dan kondusif;

3.6 Permasalahan

Disamping keberhasilan pelaksanaan program, masih ada kekurangan dan kendala yaitu :

- 3.6.1 Pelaksanaan program/kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga masih dominan menggunakan metode sosialisasi. Tentu hal ini merupakan cara lamban yang dilakukan pemerintah, mengenai model sosialisasi yang cenderung hanya sebagian orang mendapatkan informasi mengenai pendidikan politik, ideologi Pancasila, maupun wawasan kebangsaan.
- 3.6.2 Perlu ada keseimbangan informasi yang modern yang dimana menggunakan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat generasi muda saat ini, sehingga informasi mampu tersampaikan keseluruhan kalangan generasi muda serta masyarakat umum.
- 3.6.3 Pelaksanaan program tentu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut. Namun sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Purbalingga masih belum mampu maksimal dalam menjalankan program, dilihat dari minimnya kuantitas maupun kulaitas SDM yang membidangi bidang tersebut.
- 3.6.4 Belum selarasnya IKU Penetapan IKU yang belum satu IKU mulai dari tingkat Kementerian sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan pertimbangan kondisi daerah berbeda-beda

B. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai 6 Program, 13 Kegiatan dan 37 sub kegiatan. Adapun rincian selengkapnya, pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	Kebijakan	Target dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						34.619.389.000	33.875.417.592	97,85	743.971.408
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.501.069.000	2.282.855.732	91,28	218.213.268
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100%	3.694.000	3.639.000	98,51	55.000
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	1 dokumen	100%	1.866.000	1.859.000	99,62	7.000
	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 dokumen	3 dokumen	100%	1.828.000	1.780.000	97,37	48.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100%	1.916.660.000	1.748.396.447	91,22	168.263.553
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11 ASN	11 ASN	100%	1.789.393.000	1.626.002.413	90,87	163.390.587
	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	12 bulan	100%	90.367.000	85.924.034	95,08	4.442.966
	1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		350 dokumen	350 dokumen	100%	36.900.000	36.470.000	98,83	430.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100%	3.900.000	3.900.000	100,00	0
	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	2 laporan	100%	3.900.000	3.900.000	100,00	0
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100%	24.000.000	11.227.976	46,78	12.772.024
	1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		4 orang	4 orang	100%	24.000.000	11.227.976	46,78	12.772.024
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	100%	75.237.000	71.720.044	95,33	3.516.956
	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	12 bulan	100%	1.600.000	1.588.500	99,28	11.500
	1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	12 bulan	100%	50.615.000	48.203.444	95,24	2.411.556
	1.5.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	12 bulan	100%	1.200.000	1.160.000	96,67	40.000
	1.5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 bulan	12 bulan	100%	11.984.000	11.904.600	99,34	79.400
	1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	12 bulan	100%	4.388.000	4.360.000	99,36	28.000
	1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 bulan	12 bulan	100%	5.450.000	4.503.500	82,63	946.500
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	100%	280.268.000	246.949.265	88,11	33.318.735
	1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	12 bulan	100%	400.000	0	0,00	400.000
	1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	12 bulan	100%	61.320.000	34.447.186	56,18	26.872.814
	1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan	12 bulan	100%	10.000.000	6.985.000	69,85	3.015.000
	1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	12 bulan	100%	208.548.000	205.517.079	98,55	3.030.921

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	100 persen	100%	197.310.000	197.023.000	99,85	287.000
	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		14 unit	14 unit	100%	180.000.000	179.774.500	99,87	225.500
	1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30 unit	30 unit	100%	7.310.000	7.250.000	99,18	60.000
	1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 bulan	12 bulan	100%	10.000.000	9.998.500	99,99	1.500
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						642.195.000	606.987.336	94,52	35.207.664
	2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		31,9 per 10000 penduduk	8,80 per 10000 penduduk	27,59%	642.195.000	606.987.336	94,52	35.207.664
	2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		12 dokumen	12 dokumen	100%	18.238.000	16.803.305	92,13	1.434.695
	2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		3305 orang	880 orang	100%	621.457.000	587.809.031	94,59	33.647.969
	2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		12 laporan	12 laporan	100%	2.500.000	2.375.000	95,00	125.000
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						29.121.289.000	29.082.887.732	99,87	38.401.268
	3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		0,32	0,36	111,88%	29.121.289.000	29.082.887.732	99,87	38.401.268

		3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1000 orang	1134 orang	113,40%	28.763.889.000	28.736.918.732	99,91	26.970.268
		3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1000 orang	720 orang	72%	37.400.000	35.148.000	93,98	2.252.000
		3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12 laporan	12 laporan	100%	320.000.000	310.821.000	97,13	9.179.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							909.060.000	826.749.725	90,95	82.310.275
	4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			23,96 persen	33,33 persen	139,15%	909.060.000	826.749.725	90,95	82.310.275
		4.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		12 dokumen	12 dokumen	100%	209.160.000	193.444.725	92,49	15.715.275
		4.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan		1000 orang	1000 orang	100%	694.900.000	632.730.000	91,05	62.170.000
		4.1.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		12 laporan	12 laporan	100%	5.000.000	575.000	11,50	4.425.000

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						182.120.000	154.131.490	84,63	27.988.510	
	5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			31,9 per 10000 penduduk	2,92 per 10000 penduduk	9,15%	182.120.000	154.131.490	84,63	27.988.510
		5.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		12 dokumen	12 dokumen	100%	36.310.000	23.151.490	63,76	13.158.510
		5.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		900 orang	300	30%	129.700.000	126.200.000	97,30	3.500.000
		5.1.3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					13.610.000	2.980.000	21,90	10.630.000
		5.1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		12 laporan	12 laporan	100%	2.500.000	1.800.000	72,00	700.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						1.263.656.000	921.805.577	72,95	341.850.423	
	6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanjapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			60 potensi konflik	64 potensi konflik	97,35%	1.263.656.000	921.805.577	72,95	341.850.423

	6.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		12 dokumen	12 dokumen	100%	414.082.000	357.621.162	86,36	56.460.838
	6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		2880 orang	1416 orang	49,20%	487.650.000	464.980.000	95,35	22.670.000
	6.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		12 laporan	12 laporan	100%	62.750.000	46.800.000	74,58	15.950.000
	6.1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 laporan	12 laporan	100%	299.174.000	52.404.415	17,52	246.769.585

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, program-program prioritas Badan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 37 sub kegiatan. Anggaran belanja Badan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar Rp.34.619.389.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.875.417.592,- atau 97,85% yang meliputi :

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp.34.619.389.000,- dengan realisasi sebesar Rp.33.875.417.592,- atau sebesar 97,85%, dengan rincian belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai Rp.1.829.443.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.665.677.413,- atau 91,05%;
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp.3.143.761.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.864.205.179,- atau 83,9%;

- c. Belanja Hibah Rp.29.376.185.000,- dengan realisasi sebesar Rp.29.345.535.000,- atau 99,90%.
- 2) Belanja Modal sebesar Rp.0,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%

BAB IV

PENUTUP

1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

Sebagai Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, maka secara umum indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebagian telah tercapai sesuai target yang direncanakan. Hal tersebut didukung dengan data capaian per indikator kinerja sesuai tabel berikut :

Tabel 4.1

Capaian per Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik sosial yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95,30	97,37	102,17
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Rasio	31,90	25,81	80,91
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Cakupan pendidikan politik Masyarakat	Persen	0,32	3,58	1118,75

		Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0,20	0,24	120,00
Meningkatnya kualitas kelembagaan BAKESBANGPOL		Nilai kematangan Perangkat Daerah	Nilai	43,00	43,00	100,00
	Meningkatnya implementasi SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai	73,10	73,06	99,95

2. Upaya Tindak Lanjut atas strategi peningkatan kinerja

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purbalingga telah melakukan serangkaian langkah perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini merupakan tindak lanjut dari strategi peningkatan kinerja yang telah dirumuskan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Melalui implementasi strategi tersebut, Badan Kesbangpol berkomitmen untuk memperkuat perencanaan kinerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mendorong akuntabilitas dalam pencapaian sasaran organisasi. Upaya ini mencerminkan kesungguhan perangkat daerah dalam menjawab tantangan kinerja dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, yaitu meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Guna mendukung capaian indikator persentase potensi konflik yang berhasil diredam sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka, Badan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang menasar langsung masyarakat di tingkat akar rumput. Upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai penanganan konflik sosial, penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, serta pendidikan politik sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi konflik. Selain itu, dilakukan pula

sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial masyarakat. Sebagai bentuk inovasi dan penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, Badan Kesbangpol juga telah menginisiasi awal pembentukan Desa Pelopor Pancasila di 4 (empat) desa terpilih melalui sosialisasi. Program ini diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif, serta memiliki daya tangkal terhadap potensi konflik dan paham-paham intoleran. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Badan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dalam membangun ketahanan sosial dan ideologis masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah dan memperkuat semangat kebangsaan di tingkat lokal.

- b. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, yaitu menurunnya potensi konflik di masyarakat yang diukur melalui cakupan pencegahan/tangkal dini konflik, telah dirumuskan berbagai langkah strategis yang telah dilaksanakan secara bertahap dan terarah. Sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi konflik, Badan Kesbangpol telah memperluas kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai penanganan konflik sosial, khususnya di wilayah-wilayah yang dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap gesekan sosial. Pendekatan ini dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif serta memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis. Selain itu, Badan Kesbangpol juga telah mendayagunakan satuan tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (Satgas P4GN) melalui penyusunan program kerja yang terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu faktor pemicu kerawanan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik.

Program pembinaan dan pengembangan Desa Pelopor Pancasila juga terus diupayakan untuk ditingkatkan sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai kebangsaan. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk menjadi agen pemersatu, penggerak toleransi, serta penjaga nilai-nilai Pancasila di tingkat desa. Untuk memperkuat deteksi dan respons dini terhadap potensi konflik, Badan Kesbangpol telah menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan intelijen dasar bagi aparatur pemerintahan desa dan kecamatan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi gejala awal konflik dan mengambil langkah antisipatif secara cepat dan tepat. Sebagai penguatan sistematis, telah dilakukan pula pengembangan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASDINDA) sebagai alat bantu monitoring dan pelaporan dini terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban, serta konflik horizontal di masyarakat.

Seluruh upaya tersebut merupakan bentuk komitmen Badan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan damai, serta membangun ketahanan sosial-politik masyarakat sebagai bagian penting dari stabilitas daerah.

c. Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dengan 2 (dua) capaian indikator kinerja, Bakesbangpol Purbalingga telah melaksanakan Langkah Langkah berikut :

- Terkait dengan cakupan pendidikan politik masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah mengintensifkan pendidikan politik kepada pemilih pemula, khususnya penduduk usia 16 hingga 17 tahun. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga pendidikan menengah, pelaksanaan apel rutin di sekolah-sekolah sasaran, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kegiatan pendidikan politik yang berkelanjutan di kalangan generasi muda.
- Terkait dengan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah mengintensifkan pendidikan wawasan kebangsaan kepada penduduk usia produktif. Kegiatan ini telah dilaksanakan melalui penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, pelaksanaan apel rutin di sekolah-sekolah sasaran, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga seperti yang dijelaskan pada Bab I diatas maka strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Purbalingga di masa mendatang antara lain:

1. Terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yaitu Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan dan partisipasi politik Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga melaksanakan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang penanganan konflik sosial, wawasan kebangsaan, sosialisasi P4GN, dan pendidikan politik, serta membentuk Desa Pelopor Pancasila di 4 (empat). Sampai dengan tahun 2024 tercatat 8 desa telah mendapatkan pembinaan awal sebagai Desa Pelopor Pancasila. Untuk selanjutnya ditargetkan pada tahun mendatang pembentukan Desa Pelopor Pancasila dapat dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

2. Terkait pencapaian Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah Menurunnya potensi konflik dimasyarakat dengan capaian indikator kinerja Cakupan pencegahan/tangkal dini konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga akan memperbanyak sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang penanganan konflik sosial kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga, Pembinaan dan pengembangan Desa Pelopor Pancasila, Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar bagi aparatur pemerintahan desa dan kecamatan, secara bergilir menyisir desa dan kecamatan yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pada tahun sebelumnya, serta berkolaborasi dengan BNNK melaksanakan sosialisasi P4GN dan membentuk Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba), dan menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang P4GN. Penyusunan Perbup P4GN sampai saat ini masih dalam proses. Pengembangan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASDINDA) kedepan diharapkan dapat diakses tidak hanya oleh AWASDINDA (Agen Kewaspadaan Dini Daerah) namun dapat diakses langsung oleh masyarakat luas.

3. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam bidang politik dalam negeri dengan 2 (dua) capaian indikator kinerja

a. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang Terkait dengan Cakupan Pendidikan politik khususnya pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga yakni dengan melakukan diversifikasi media kegiatan. Sebagai

bagian dari upaya perluasan cakupan pendidikan politik, strategi ke depan diarahkan pada peningkatan jangkauan wilayah serta diversifikasi media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan politik tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi merata hingga ke desa atau kelurahan yang sebelumnya belum tersentuh oleh program serupa. Di samping perluasan wilayah, pendekatan inovatif melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi mengembangkan media alternatif seperti siaran radio lokal, video pendek yang disebarluaskan melalui media sosial, podcast bertema politik, serta infografis edukatif akan digunakan untuk menjangkau segmen generasi muda. Dengan demikian, penyampaian materi pendidikan politik tidak hanya dilakukan secara konvensional (tatap muka), tetapi juga melalui kanal digital yang lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyampaian pesan sekaligus memperluas jangkauan audiens, sehingga kesadaran dan partisipasi politik pemilih pemula dapat tumbuh secara lebih merata dan berkelanjutan. Dengan dibatasinya anggaran untuk kegiatan sosialisasi, maka Badan Kesbangpol Purbalingga perlu melakukan inovasi kegiatan yang tidak bermuara kepada jenis kegiatan konvensional seperti sosialisasi;

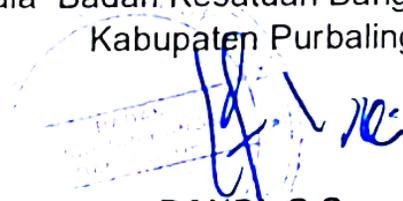
- b. Strategi peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan ke depan masih akan difokuskan pada penguatan intensitas kegiatan bagi kelompok penduduk usia produktif. Kelompok ini dinilai strategis karena memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan akan diarahkan tidak hanya pada perluasan jangkauan wilayah hingga menjangkau desa atau kelurahan yang sebelumnya belum terfasilitasi tetapi juga pada diversifikasi bentuk dan media penyampaiannya. Pendekatan inovatif akan digunakan untuk memperkuat efektivitas pesan, antara lain melalui media radio lokal, konten video edukatif, infografis digital, serta kampanye nilai-nilai kebangsaan di platform media sosial yang populer di kalangan usia produktif. Dengan demikian, pendidikan wawasan kebangsaan tidak hanya dilaksanakan secara formal melalui tatap muka, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk komunikasi digital yang mudah diakses, menarik, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat

usia produktif. Harapannya, strategi ini mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan secara lebih luas dan berkelanjutan tanpa harus tergantung dari anggaran yang besar. Karena dengan adanya keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, Badan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dituntut untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengembangkan pendekatan yang tidak hanya terpaku pada metode konvensional seperti sosialisasi tatap muka.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2023, semoga menjadi motivasi dan melecut kami untuk bekerja keras dimasa mendatang demi memujudkan visi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga



PANDI, S.Sos

NIP. 196907171991011003

